Majalah Ilmiah

Edisi Agustus 2012

Implikasi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kelurahan Kayu Putih Dalam Mendukung Pendapatan Daerah Kota Kupang	Gasim, SE, M.Hum	1 – 7
Pengadaan Barang / Jasa Pada Pemda NTT Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Syaiful Amalo, MH, M.Si Ali Amran, SH, M.Hum	8 – 18
Analisis Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Cakalang (<i>Katsuwonus pelamis</i>) Di Perairan Teluk Maumere	Rusydi, S.Pi, M.Si Gufran, S.Pi., M.Si	19 – 22
Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana	Rahmat Majid, SH, M.Hum	23 – 30
Dukungan Teknologi Dan Informasi Dalam E-Government	Akbar Yusuf, SE	31 – 39
Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Kupang Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha	Wellem, S.Sos, M.Hum Yustianus, S.Sos	40 – 52
Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>) Dan Dampaknya Dalam Pembangunan Ekonomi	Drs. Burhanudin Gesi, M. Hum	53 – 64
Makna Pembayaran Belis Suku Bangsa Rote Yang Berdampak Pada Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Di Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.”	Idris, S.Sos, M.Si Nurdin, S.Sos, M.Hum	63 – 66
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Studi Kasus di Polresta Kupang Kota)	Nurdin, S.Sos, M.Hum	67 – 74
Pengendalian Interen Terhadap Sistem Penerimaan Kas Atas Penjualan Tiket Pada PT. Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan Cabang Kupang	Sulaiman, SE, MM	74 – 78
Isolasi Dan Identifikasi Bakteri <i>Salmonella</i> dan <i>Staphylococcus aureus</i> Pada Ikan Tongkol Asap Yang Di Simpan Pada Suhu Yang Berbeda	Drs. Abdul Majid, M. Kes	79 – 84
Identifikasi Senyawa Antibakteri Pada Ekstrak Akar Herba <i>Acalypha indica</i> L.	Dra. Nikmah, M.Pd	85 – 88
Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kupang pada Bank Tabungan Negara (persero) Kantor Cabang Kupang	Abdul Malik Hasyim, SE, MM	89 – 94
Studi Tentang Potensi Rumah Tangga Perikanan Tangkap Di Kelurahan Wolomarang Kabupaten Sikka	Abdul Majid, S.Pi, MM Siti Halija, S.Pi, M.Si	95 – 101
Standar Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus pada pengadilan negeri Klas I A Kupang)	Siti Syahida Nurani, SH, M. Hum Syaiful Amalo, MH, M.Si	102 – 109
Pengaruh Siaran Televisi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Mis Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Tahun 2011	Usman Sakan, S.Ag, M.Pd Dra. Siti Ramlah, M.Pd	110 – 112
Memotret Pelaksanaan Pola Kemitraan Usaha	Drs. Burhanudin Gesi, M.Hum Hanifah Zakaria, SE	113 – 114
Persepsi Masyarakat Terhadap Pijat Tradisional (Studi Kasus Terhadap Kegiatan Pijat Tradisional Di Kelurahan Kuanino Kota Kupang)	Zainur Wula, S.Pd, M.Si	115 – 120
Interaksi Sosial Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang)	Siti Syahida Nurani, SH, M. Hum Zainur Wula, S.Pd, M.Si	121 – 124

Daftar Isi

Implikasi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kelurahan Kayu Putih Dalam Mendukung Pendapatan Daerah Kota Kupang	1
Pengadaan Barang / Jasa Pada Pemda NTT Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	8
Analisis Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan Cakalang (<i>Katsuwonus pelamis</i>) Di Perairan Teluk Maumere	19
Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana	23
Dukungan Teknologi Dan Informasi Dalam E-Government	31
Penertiban Pedagang Kaki Lima Kota Kupang Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Usaha	40
Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>) Dan Dampaknya Dalam Pembangunan Ekonomi	53
Makna Pembayaran Belis Suku Bangsa Rote Yang Berdampak Pada Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat Di Kelurahan Babau Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang."	63
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Studi Kasus di Polresta Kupang Kota)	67
Pengendalian Interen Terhadap Sistem Penerimaan Kas Atas Penjualan Tiket Pada PT. Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan Cabang Kupang	74
Isolasi Dan Identifikasi Bakteri <i>Salmonella</i> dan <i>Staphylococcus aureus</i> Pada Ikan Tongkol Asap Yang Di Simpan Pada Suhu Yang Berbeda	79
Identifikasi Senyawa Antibakteri Pada Ekstrak Akar Herba <i>Acalypha indica</i> L.	83
Analisis Kebijakan Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SD Di Dinas Pendidikan Kota Kupang (Studi Kasus Di SD Muhammadiyah 1 dan SD Muhammadiyah 2 Kota Kupang)	83
Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kupang pada Bank Tabungan Negara (persero) Kantor Cabang Kupang	89

Studi Tentang Potensi Rumah Tangga Perikanan Tangkap Di Kelurahan Wolomarang Kabupaten Sikka	95
Standar Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus pada pengadilan negeri Klas I A Kupang)	102
Pengaruh Siaran Televisi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas V Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Mis Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur Tahun 2011	110
Memotret Pelaksanaan Pola Kemitraan Usaha	113
Persepsi Masyarakat Terhadap Pijat Tradisional (Studi Kasus Terhadap Kegiatan Pijat Tradisional Di Kelurahan Kuanino Kota Kupang)	115
Interaksi Sosial Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Pada Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang)	120

Memotret pelaksanaan Pola kemitraan usaha

Oleh
Hanifah Zakaria
Burhanudin Gesi

WACANA seputar pembangunan ekonomi nasional belakangan ini marak dengan memperbincangkan ikhwal bagaimana membangun suatu dunia usaha yang tangguh, sekaligus memiliki prospek cerah ke depan. Dari perbincangan itu ditawarkan pemikiran alternatif, bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi bangsa ini salah satunya ditentukan oleh usaha membangun solidnya pola kemitraan usaha bagi pengusaha kecil dan menengah. Assumsi yang berkembang adalah bahwa kuatnya struktur ekonomi dari menengah ke bawah dapat memperkokoh fondamen ekonomi nasional.

Tatkala Soeharto masih menjabat Presiden, pada tanggal 25 Mei 1996 digulirkan gerakan kemitraan usaha nasional. Menyambut ajakan presiden itu, sebanyak 41 kelompok usaha besar menyatakan komitmennya untuk bermitra dengan 99.662 koperasi dan pengusaha kecil di seluruh Indonesia dengan nilai kemitraan lebih dari Rp 2,9 trilyun. Pertanyaannya adalah bahwa apakah program kemitraan usaha tersebut mampu menghilangkan atau setidaknya mengurangi kesenjangan antara yang besar dan yang kecil dalam rangka membangun suatu struktur dunia usaha yang tangguh???

Hingga kini, pola kemitraan usaha yang dikembangkan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yakni pola keterkaitan langsung dan keterkaitan tidak langsung. Pola keterkaitan langsung, dengan merunut pada pikiran "*Mudradjat Kuncoro*" (2007 : 321), meliputi : (1) Pola PIER (perkebunan Inti Rakyat) dengan memposisikan bapak angkat sebagai inti dan petani kecil sebagai plasma (2) Pola dagang dengan menempatkan bapak angkat sebagai pemasar produk yang dihasilkan oleh mitra usahanya, yaitu anak angkatnya (3) Pola Vendor, dimana produk yang dihasilkan oleh anak angkat tidak memiliki hubungan kedepan maupun kebelakang dengan produk yang dihasilkan oleh Bapak angkatnya, misalnya PT. Krakatau Still yang "*core businessnya*" menghasilkan emping melinjo. (4) Pola subkontrak, dimana produk yang dihasilkan oleh anak angkat merupakan proses produksi usaha yang dilakukan oleh bapak angkat, selain itu terdapat interaksi antara anak angkat dan bapak angkat dalam bentuk keterkaitan teknis, keuangan, atau informasi.

Sementara itu pola keterkaitan tidak langsung merupakan pola pembinaan murni. Dalam pola ini tidak ada hubungan bisnis langsung antara Pak Bina dengan mitra usaha. Bisa dipahami apabila pola ini lebih tepat dilakukan oleh Perguruan Tinggi, sebab salah satu dharmanya ialah pengabdian kepada masyarakat. Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, misalnya, telah merintis kerjasama dengan 16 Perguruan Tinggi pada tahun 2008/2009 untuk membentuk pusat konsultasi pengusaha kecil (PKPK). Selama ini pola pembinaan melalui program ini meliputi pelatihan pengusaha kecil, pelatihan calon konsultan pengusaha kecil, bimbingan usaha, dan seminar/lokakarya (Semiloka) usaha kecil.

Program kemitraan dan jaringan subkontrak angkanya belum memasyarakat di Indonesia. Hasil penelitian (Bachruddin, 2006 : 82) di 6 Provinsi menunjukkan bahwa program kemitraan masih kurang dibandingkan dengan jumlah pengusaha kecil yang ada. Hal ini terbukti karena 89 % pengusaha kecil belum mempunyai bapak angkat, padahal para pengrajin seperti pengrajin Kayu Cendana di Kupang yang menjalin program kemitraan merasakan manfaat yang besar dibidang permodalan, pemasaran, dan yang paling utama adalah manajemen.

Kemitraan usaha, setidaknya antara pengusaha besar dan pengusaha kecil menengah, di Indonesia belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Beberapa sebab dapat disebutkan, yakni adanya kelemahan dalam memperoleh peluang usaha besar dan memperbesar pangsa pasar, kelemahan struktur permodalan dan keterbatasan jalur terhadap sumber-sumber permodalan, kelemahan dibidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antara pengusaha kecil (sistem Informasi Pasar), iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan, masih kurangnya pembinaan terpadu, serta kurangnya kepercayaan dan kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Kendala-kendala di atas mengindikasikan masih tersendatnya implementasi program kemitraan. Deklarasi Jimbaran, misalnya, bagi pengusaha kecil masih dirasakan lebih bersifat politis ketimbang realisasinya. Penyebabnya, barangkali banyak usaha besar (termasuk BUMN) belum merasakan kehadiran usaha kecil dan menengah sebagai langkah manajemen strategisnya. Mereka membantu dan membina kemitraan semata-mata karena anjuran pejabat atau ketakutan akan isu kesenjangan nasional.

BUMN, misalnya, kebanyakan sekedar memenuhi tuntutan menteri keuangan untuk menyisihkan 1-5 % (dari laba setelah dikurangi pajak) untuk membina koperasi dan usaha kecil. Dengan kata lain, keterpaksaan ini banyak berakibat tidak langgengnya kemitraan yang dilakukan. Bagi pengusaha kecilpun, merasakan kehadiran BUMN sekedar sinterklas yang membagi-bagi dana murah.

Dari realitas pelaksanaan pola kemitraan usaha semacam itu tentunya diperlukan re-orientasi prinsip kemitraan, dari sekedar "charity" strategi menjadi "empowering". Semestinya, jalinan kemitraan usaha senantiasa didasarkan pada prinsip simbiosis mutualistik, yakni saling membutuhkan, saling membantu, dan pada akhirnya saling menguntungkan. Prinsip simbiosis mutualistik ini memang mampu menjalin kemitraan berjalan lebih langgeng karena bersifat alami dan tidak atas dasar belas kasihan (Charity Strategi).

Berdasarkan ukuran prinsip tersebut, usaha besar akan selalu mengajak usaha kecil sebagai "partner in progress". Pola bapak-anak banyak yang tidak didasari prinsip saling membutuhkan. Faktanya, sering kali bidang usaha bapak angkat sama sekali berbeda dan tidak ada kaitan hulu-hilir atau hilir-hulu dengan bidang usaha dari usaha kecil yang menjadi anak angkatnya. Bagi BUMN, sistem bapak angkat adalah tuntutan dengan menyisihkan 1-5 % labanya untuk kemitraan, sementara bagi perusahaan swasta besar adalah dengan cara persuasif.

Prinsip simbiosis mutualistik akan muncul apabila usaha besar memang merasa membutuhkan kehadiran usaha kecil. Misalnya untuk meningkatkan efisiensi, pengrajin cendana di kupang mendapat pasokan bahan baku dari petani kayu cendana di Timor Tengah Selatan-NTT sehingga dapat menekan ongkos, berikut adanya "technical linkage". Jelasnya, dengan pola kemitraan subkontrak dan dagang semacam itu juga timbul suatu mutual relationship yang memperlancar proses produksi yang saling menguntungkan.

Apabila prinsip dan pola kemitraan tersebut diterapkan, maka kemitraan bukan lagi menjadi barang mewah di Indonesia, melainkan akan menjadi barang kebutuhan sebagaimana lazimnya hubungan bisnis yang lain. Dengan demikian, kemitraan bukan lagi merupakan "charity strategy" tetapi terutama mengemuka menjadi tuntutan hubungan usaha-ekonomi yang wajar dalam rangka membangun struktur dunia usaha yang kokoh. Dalam hal ini, tiap struktur ekonomi dapat mengembangkan rasa saling

menopang, membantu dan pada gilirannya akan saling menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA.

- Mudradjat Koncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Cetakan pertama, Penerbit Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2007.
- Tono Bachruddin, *Pengembangan Profil Dunia Usaha*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2005.
- Prospektif, *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Kepengusahaan, Kajian Masalah Nasional dan Internasional*, Volume 5, Jakarta, 2003.
- Prisma, *Majalah kajian Ekonomi dan Sosial*, Edisi 25 thn 2001-2006, LP3ES, Jakarta, 2006.